

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah melakukan pengujian terhadap pengaruh belanja pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) secara kuantitatif, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Setelah diuji secara disagregasi berdasarkan klasifikasi ekonomi, belanja pemerintah daerah memiliki pengaruh beragam terhadap pertumbuhan ekonomi regional, yaitu:
 - a. Belanja pegawai pemerintah daerah secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.
 - b. Belanja barang dan jasa pemerintah daerah secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
 - c. Belanja bunga pemerintah daerah secara statistik berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
 - d. Belanja subsidi pemerintah daerah secara statistik tidak signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.
 - e. Belanja hibah pemerintah daerah secara statistik tidak signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional
 - f. Belanja bantuan sosial pemerintah daerah berkorelasi negatif dan secara statistik signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.

- g. Belanja modal pemerintah daerah berkorelasi negatif dan secara statistik signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.
 - h. Belanja tidak terduga pemerintah daerah berkorelasi negatif dan secara statistik signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.
2. Secara simultan, belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Penggabungan data daerah otonom baru dengan data daerah induknya dapat menimbulkan permasalahan, yaitu akan terjadi lonjakan data belanja daerah induk pada tahun saat datanya digabungkan. Hal tersebut merupakan keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
2. Beberapa penelitian sebelumnya melakukan pengujian *reverse causality* untuk membuktikan berlaku atau tidaknya Wagner's Law dalam model penelitian, yaitu teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memengaruhi pertumbuhan belanja pemerintah, bukan sebaliknya. Namun, pada penelitian ini, pengujian tersebut tidak dilakukan karena asumsi yang digunakan adalah bahwa peningkatan belanja pemerintah akan memengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3. Penelitian yang dilakukan hanya ditekankan dari segi pertumbuhan ekonomi jangka panjang sehingga tidak melakukan pengujian atas pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
4. Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh kebijakan fiskal khususnya belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan periode penelitian yang sangat panjang, rata-rata dua puluh tahun sehingga pengaruh variabel belanja daerah pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dapat tergambarkan dengan baik. Pada penelitian ini, ketersediaan data *time-series* terbatas yaitu hanya sebelas tahun (tujuh periode observasi setelah diberi perlakuan rata-rata bergerak).

5. Menurut banyak literatur, determinan pertumbuhan ekonomi ada banyak, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel kontrol yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

C. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada peneliti lain dan instansi pemerintah yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi regional merupakan tujuan yang krusial bagi pemerintah daerah, tetapi bukan satu-satunya kriteria yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan alokasi belanja daerah. Terdapat tujuan lain yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan. Meskipun belanja modal pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur melalui belanja modal harus dilakukan agar dapat mengurangi kesenjangan fasilitas layanan dasar publik antardaerah. Pemerintah daerah harus dapat merumuskan struktur belanja modal dan belanja infrastruktur yang berkualitas dan efektif sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Namun, apabila pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan yang paling mendesak dari pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dapat memprioritaskan alokasi sumber daya keuangannya pada belanja yang memiliki dampak negatif paling minimum terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
2. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, dapat mengarahkan kebijakan penggunaan dana transfer untuk pos-pos belanja yang menurut beberapa teori dan literatur penelitian dapat berdampak terhadap perekonomian, misalnya belanja modal untuk pendidikan.
3. Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah harus berkoordinasi untuk memperbaiki manajemen belanja daerah, khususnya belanja modal dan bantuan sosial. Dengan begitu, diharapkan belanja tersebut dapat efektif mencapai tujuannya.
4. Mengingat hasil penelitian menyatakan bahwa semua kategori belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional,

peneliti selanjutnya dapat menguji pengaruh belanja pemerintah daerah berdasarkan fungsi, misalnya belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja subsidi dan transfer, serta belanja bantuan sosial untuk fungsi Pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

5. Peneliti selanjutnya dapat melakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui ada atau tidaknya permasalahan endogenitas dan *reverse causality* antara belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan metode statistik yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan tersebut jika ditemukan dalam penelitian serupa.



DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, R. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN
- Barro, R. 1990. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. *Journal of Political Economy*, 98(5): 103-125.
- Barro, R. 1991. Economic Growth In a Cross-Section Countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(2):407-443.
- Barro, R. 1996. Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Bose, N., Haque, M., dan Osborn, D. 2007. Public expenditure and economic growth: A disaggregated analysis for developing countries. *The Manchester School*, 75(5): 533-556.
- Brons, M., de Groot, H.L.F., dan Nijkamp, P. 1999. "Growth Effects of Fiscal Policies: A Comparative Analysis in a Multi-Country Context". *Tinbergen Institute Discussion Papers 99-042/3*, Tinbergen Institute.
- Dandan, M.M. 2011. Government Expenditures and Economic Growth in Jordan. *International Conference on Economic and Finance Research*, 4.
- Deswantoro, D.B., Ismail, A., dan Hendarmin. 2017. Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 6, No. 3, 187-210.
- Devarajan, S., Swaroop, V., dan Zou, H. F. 1996. The composition of public expenditure and economic growth. *Journal of Monetary Economics*, 37: 313-344.
- Dharmakarja, I. G. M. A. 2017. Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial. *Substansi*, 1(2): 374-389.
- Esterly, W., dan Rebelo, S. 1993. Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation. *Journal of Monetary Economics*, 32: 417-458.
- Febriyani. 2013. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa Tahun 2014. *Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Ghozali, I., dan Ratmono, D. 2013. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gregoriou, A., dan Ghosh, S. 2008. On The Heterogenous Impact of Public Capital And Current Spending On Growth Across Nations. *Economics Letters*, 105: 32-35.
- Gujarati, D. 2003. *Basic Econometrics 4th Edition*. New York: McGraw Hills.
- Gujarati, D., dan Porter, D. 2015. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gupta, S., Clements, B., Baldacci, E., dan Mulas-Granados, C. 2005. Fiscal policy, expenditure composition, and growth in low-income countries. *Journal of International Money and Finance*, 24: 441-463.
- Indriani, H. 2011. Analisis Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Di Era Otonomi Daerah. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Jawa Tengah: Universitas Sebelas Maret.
- Jones, C.I., dan Vollrath, D. 2013. *Introduction to Economic Growth: Third Edition*. London: W.W. Norton Company, Inc.
- Kuznets, S. 1973. Modern Economic Growth: Findings and Reflections. *The American Economic Review*, 63(3): 247-258.
- Kormendi, Roger. C. dan Meguire, Philip P. 1985. Macroeconomic Determinants of Growth: Cross Country Evidence. *Journal of Monetary Economic*, 16(1985):141-163.
- Laboure, M., dan Taugourdeau, E. 2018. Does Government Expenditure Matter for Economic Growth?. *Global Policy*. 9. 10.1111/1758-5899.12540.
- Landau, D. 1986. Government and Economic Growth in the Less Developed Countries: An Empirical Study for 1960-1980. *Economic Development and Cultural Change*, 35(1): 35-75.
- Leshoro, T.L.A. 2017. *An Empirical Analysis of Disagregated Government Expenditure and Economic Growth in South Africa*. UNISA Working Paper 10/2017.
- Lowell, G., dan Vedder, R., 2002. The Impact of Transfer Payments on Economic Growth. *The Quarterly Journal of Austrian Economics*, 5(1): 57-65.
- Mankiw, N.G., Romer, David., dan Weil, David N. 1992. A Contribution To The Empirics of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110:407-437.

- Mankiw, N. Gregory. 2015. *Macroeconomics 9th Edition*. New York: Worth Publishers.
- Nachrowi, N. D., dan Usman, H. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Novalés, A., Fernández, E., dan Ruiz, J. 2014. *Economic Growth Theory and Numerical Solution Methods 2nd Edition*. Heidelberg: Springer.
- Oleyeke, O., dan Falade, O.E. 2016. Government Capital Expenditure And Economic Growth In Nigeria: Any Lesson From Disaggregated Analysis?. *European Journal of Business And Management*, 8(31): 76-84.
- Ram, R. 1986. Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence from Cross Section and Time-Series Data. *The American Economic Review*, 76(1): 191-203.
- Reed, W., dan Ye, H. 2011. Which panel data estimator should I use? *Applied Economics*(43): 985-1000.
- Sekaran, U. dan Bougie, R. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis: Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Schiller, B. 2008. *The Macro Economy Today 11ed*. New York: McGraw-Hill.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Spencer, R.W., dan Yohe, W.P. 1970. The “Crowding-Out” of Private Expenditures by Fiscal Policy Actions. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, (October 1970).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukirno, S. 2014. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sriyana, J. 2014. *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Skoufias, E., dan Olivieri, S. 2013. Sources of Spatial Welfare Disparities in Indonesia: Household Endowment or Returns?. *Journal of Asian Economics*: 62-79.
- Tarigan, R. 2013. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Todaro, M., dan Smith, S. (2014). *Economic Development 12th Edition*. Boston: Pearson.

Tragakes, E. 2012. *Economics for the IB Diploma Second Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.

Widarjono, A. 2013. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*. Jakarta: Ekonosia.

Winarno, W.W. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah std. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.

Media Online Berita

Azka, R.M. 2018. Pemerintah Tekankan Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan. <https://id.beritasatu.com/home/> (diakses 22 Februari 2019).

Fuad, H. 2018. Ini Strategi Pemerintah Tingkatkan Pemerataan Pembangunan. <https://ekbis.sindonews.com/read/1322611/33/> (diakses 22 Februari 2019).

Kusuma, H. 2018. Penjelasan Lengkap Kemenkeu Soal Sumber Anggaran THR PNS Daerah. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4053146/penjelasan-lengkap-kemenkeu-soal-sumber-anggaran-thr-pns-daerah>, (diakses 24 Juni 2019).

Sekretariat Nasional FITRA. 2015. Potensi Penyelewengan Dana Hibah dan Bantuan Sosial. <https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2016/05/potensi-penyelewengan-dana-hibah-bantuan-sosial/> (diakses 18 Mei 2019).

Wisnu. 2018. Tjahjo Meminta Pemerintah Daerah Batasi Dana Hibah. <https://nasional.tempo.co/read/782530/tjahjo-meminta-pemerintah-daerah-batasi-dana-hibah/full&view=ok>, (diakses 18 Mei 2019).

Anggit, I. 2018. Pengakuan Sri Mulyani Ekonomi RI Ternyata Tumbuh Tidak Merata. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181210110844-4-45630/pengakuan-sri-mulyani-ekonomi-ri-ternyata-tumbuh-tak-merata>, (diakses 26 Juli 2019).

Publikasi

Direktorat Jenderal Anggaran. Advetorial Nota Keuangan dan RAPBN 2017.

Direktorat Jenderal Anggaran. Informasi APBN 2018.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Arah Kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018.

Badan Pusat Statistik. Pedoman Praktis Penghitungan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2018.

